

## ANALISA KEUNGGULAN POTENSI EKONOMI REGIONAL TANGERANG SELATAN

JUMINO<sup>1)</sup>, EDI MULYANTO<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Dosen Pendidikan Ekonomi, Universitas Pamulang

*dosen01803@unpam.ac.id<sup>1)</sup>, dosen01755@unpam.ac.id<sup>2)</sup>*

### ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa dari keunggulan-keunggulan potensi ekonomi yang berada di Tangerang Selatan, sebagai kajian Ekonomi Regional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Location Quotient*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Tangerang Selatan terdapat beberapa sektor basis (sektor potensial), yaitu pada sektor pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi. Ke empat sektor basis tersebut menjadi sektor dominan untuk terus dapat dipertahankan dan dikembangkan di Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu diharapkan Kota Tangerang Selatan dapat memberikan kontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara regional maupun nasional.

**Kata Kunci:** Ekonomi; Regional; Potensi ekonomi;

### PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian nasional bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri, akan tetapi ditentukan oleh bagaimana membangun perekonomian pada wilayah - wilayah tertentu dan mensinkronisasikannya dengan kepentingan global. Selain kemajuan, kunci dalam kesuksesan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah pemerataan. Hal ini sesuai dengan falsafah perekonomian Pancasila yang ingin mewujudkan Indonesia yang makmur, sejahtera dan adil secara merata. Oleh karena itu, perlu membangun basis-basis perekonomian yang menyebar dan

merata adalah agenda penting bagi Indonesia. Usaha- usaha tersebut akan bisa dilaksanakan dengan lebih memperdalam kajian tentang ekonomi regional.

Capello menyatakan bahwa ekonomi regional adalah cabang ekonomi, dimana menggabungkan aspek wilayah didalam analisis kerja pasar atau mekanisme ekonomi. (Capello,2015:1). Hal ini bermakna bahwa kajian ekonomi regional bukan hanya melihat gambaran perekonomian yang dibatasi wilayah tertentu, namun lebih pada bagaimana suatu wilayah dan atribut-atributnya

bisa mempengaruhi tindakan-tindakan ekonomi.

Tempat atau wilayah adalah pertimbangan penting dalam setiap tindakan ekonomi. Wilayah akan menciptakan jarak dan kelompok populasi yang bisa menentukan aktivitas ekonomi. Jarak adalah faktor utama dalam hal distribusi barang ekonomi. Selain itu, populasi dalam suatu wilayah juga merupakan pertimbangan penting dalam menentukan proses pemasaran dan produksi. Pelaku ekonomi akan melihat bagaimana ketersediaan bahan baku pada wilayah tertentu, jarak distribusi, ketersediaan tenaga kerja dan juga prospek konsumen dalam suatu wilayah.

Sebagaimana diterangkan oleh Capello dalam buku *Regional Economics* bahwa aktivitas ekonomi muncul, tumbuh dan berkembang disuatu regional tertentu. (Capello,2015:1). Hal ini disebabkan karena tempat adalah basis dari banyak hal yang mempengaruhi produksi, distribusi bahkan konsumsi. Perusahaan, dan pelaku ekonomi pada umumnya, memilih lokasi mereka dengan cara yang sama ketika mereka memilih faktor produksi dan teknologi mereka.

Oleh karena itu, pusat-pusat kemakmuran tidaklah terpecah, namun muncul dalam suatu kutub atau pusat tertentu yang memiliki daya tarik ekonomi. Jika tidak diatur dengan baik, fenomena ini berkonsekuensi pada kesenjangan ekonomi antara pusat dan pinggiran.

Sebagaimana dijelaskan lebih detail bahwa: Ruang mempengaruhi cara kerja sistem ekonomi. Ruang atau regional adalah sumber keuntungan (atau kerugian) ekonomi, serta penyumbang faktor produksi tinggi (atau rendah). Sisi regional atau wilayah juga dapat menghasilkan keuntungan geografis, seperti aksesibilitas yang mudah (atau sulit) dari suatu daerah dan sumber bahan baku yang tinggi (atau rendah). Wilayah juga menjadi sumbernya keuntungan dan munculnya akumulasi proses produktif: secara detailnya, kedekatan wilayah bisa menghasilkan keuntungan ekonomi yang mengurangi biaya produksi (Capello,2015:1) Sumber daya produktif didistribusikan secara tidak merata dalam suatu ruang atau wilayah: Sumber daya tersebut sering terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu.

Sejalan dengan otonomi daerah berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 berkaitan dengan Pemerintah Daerah serta Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 berkaitan perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana daerah kabupaten / kota diberikan wewenang untuk dapat membuat Perencanaan Pembangunan pada wilayah masing - masing. Adapun wewenang tersebut yakni meliputi perencanaan - perencanaan yaitu tata ruang wilayah, pembangunan wilayah dan memanfaatkan secara maksimal terhadap potensi yang ada di wilayah.

Akan tetapi pelimpahan wewenang tersebut akan memiliki konsekuensi dan tanggung jawab utama lebih besar berkaitan dengan maju dan mundurnya suatu daerah.

Dengan demikian penetapan skala prioritas yang tepat guna dan pemanfaatan potensi daerahnya masing-masing, menjadi suatu tolak ukur bahan pertimbangan didalam pengambilan kebijakan, namun harus tetap memperhatikan atau peduli pada pelestarian lingkungan hidup, agar supaya terjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang berkesinambungan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian analisa keunggulan potensi ekonomi regional Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

### Tahap Pertama

Peneliti melakukan persiapan yang berkaitan dengan hal-hal yang akan mendukung terhadap jalannya penelitian yaitu dengan cara: mencari berbagai literature dan referensi yang dapat dipercaya, telah diuji kebenarannya secara ilmiah dan akademik, sehingga hasil penelitian ini nantinya akan menghasilkan Penelitian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan suatu kebenarannya dan bermanfaat sebagai referensi dan pengembangan ilmu yang lebih baik di berikutnya.

Adapun data pendukung yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut: Tinjauan Pustaka, data-data dari berbagai sumber yang dapat

dipercaya publik yang menjadi referensi dan sumber pengolahan data yang digunakan oleh Pemerintah yaitu Lembaga Pemerintah, adalah Badan Pusat Statistik /BPS.

### Tahap Kedua

Teori yang digunakan adalah *Location Quotient*, (metode LQ) dimana fungsi dari metode ini akan digunakan untuk membandingkan terhadap Lapangan Kerja / nilai tambah untuk sektor yang sama ditingkat Nasional. Jika perumusan data menggunakan data lapangan kerja, maka rumus yang digunakan adalah :

$$LQ = \frac{li / e}{Li / E}$$

$li$  = Banyaknya lapangan kerja sektor  $i$  diwilayah analisis

$e$  = Banyaknya lapangan kerja diwilayah analisis

$Li$  = Banyaknya lapangan kerja sektor  $i$  secara Provinsi

$E$  = Banyaknya lapangan kerja secara Provinsi

**Catatan** : Dimana istilah nasional merupakan suatu wilayah yang lebih tinggi jenjangnya. Contoh: jika wilayah yang dianalisa provinsi, maka wilayah nasional adalah wilayah Negara, jika wilayah yang dianalisa adalah wilayah kabupaten / kota maka istilah nasional digunakan untuk wilayah provinsi, dan seterusnya.

Dari rumus diatas diketahui bahwa apabila  $LQ > 1$  berarti bahwa porsi lapangan kerja sektor  $i$  di wilayah analisis terhadap total

lapangan kerja wilayah adalah lebih besar dibandingkan dengan porsi lapangan kerja untuk sektor yang sama secara nasional. Artinya, sektor  $i$  di wilayah kita secara proporsional dapat menyediakan lapangan kerja melebihi porsi sektor  $i$  secara nasional.  $LQ > 1$  memberikan indikasi bahwa sektor tersebut adalah basis, sedangkan apabila  $LQ < 1$  berarti sektor itu adalah non basis.

Metode LQ banyak dikritik karena didasarkan atas asumsi bahwa produktivitas rata-rata atau konsumsi rata-rata antar wilayah adalah sama. Bias saja ada suatu wilayah yang lapangan kerjanya untuk sektor  $i$  lebih rendah, tetapi total produksinya lebih tinggi. Atau ada suatu wilayah yang lapangan kerjanya untuk sektor tertentu, misalnya sektor pangan cukup tinggi tetapi disebabkan oleh permintaan masyarakat setempat untuk pangan tersebut melebihi rata-rata nasional. Jadi, walaupun lapangan kerja yang tersedia melebihi porsi nasional tetapi hal itu hanya untuk menutupi kebutuhan lokal yang juga tinggi. Dengan demikian, produknya tidak ditujukan untuk ekspor sehingga tidak dapat dianggap basis. Lagipula jika hal itu dibandingkan antara lapangan kerja disuatu wilayah dengan lapangan kerja nasional, ada juga kemungkinan bahwa secara nasional produk itu ada yang di ekspor atau di impor. Kalau secara nasional produk itu ada yang di ekspor atau di impor berarti lapangan kerja yang tersedia secara nasional bukan lagi alat pengukur yang tepat

untuk membandingkan apakah suatu wilayah itu dapat mencukupi kebutuhannya, kelebihan atau kekurangan. Artinya, harus di kalibrasi lagi beberapa sebetulnya lapangan kerja nasional yang tepat yang membuat produk nasional tidak mengimpor dan juga tidak mengekspor.

Menghadapi kritikan ini, Tiebout (1962) menerapkan apa yang disebut *minimum requirement technique*. Dalam teknik ini dikumpulkan beberapa wilayah yang kondisinya untuk sektor tertentu lebih kurang sama. Setiap wilayah dihitung persentase lapangan kerja untuk setiap sektor. Setiap sektor yang sama dibuat ranking antara wilayah yang satu dan wilayah lainnya. Ranking itu disusun dari persentase tertinggi ke persentase terendah. Ranking terendah, yaitu persentase yang terendah, lapangan kerjanya sekedar memenuhi kebutuhan lokal. Persentasi di atas angka terendah, produksinya dianggap untuk diekspor sehingga dikategorikan sebagai basis. Untuk menghindari kemungkinan adanya angka yang ekstrem terendah, terkadang dipakai bukan angka terendah tapi misalnya ranking ketiga dari bawah. Terhadap *minimum requirement techniques* ini pun muncul berbagai masalah. Misalnya, berapakah jumlah wilayah yang diikutsertakan dalam penyusunan ranking yang dianggap memadai dan apakah kriterianya sehingga wilayah tersebut dapat dianggap memiliki kondisi yang sama. Masalah lain yang

memerlukan pikiran adalah menyangkut klasifikasi dari sektor kegiatan ekonomi yang mungkin berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain.

Misalnya, dalam kegiatan penggilingan padi bisa dimasukkan sebagai sektor pertanian di satu wilayah, tetapi dianggap sebagai kegiatan industri kecil di wilayah lain. Contoh ini bisa diperpanjang terutama untuk kegiatan rumah tangga yang mengolah hasil pertanian, seperti pembuatan tempe, tahu, makanan olahan, minyak goreng, dan anyaman bambu. Apabila kegiatan ini tidak dimasukkan kedalam klasifikasi sektor yang sama angka ranking antar wilayah yang dibuat menjadi tidak relevan. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan adalah apabila untuk suatu wilayah tertentu, banyak pekerja yang datang dari wilayah lain sebagai pelaju (*commuter* - datang dan kembali kerumahnya yang berada di wilayah lain setelah selesai bekerja). Misalnya, lapangan kerja ada di wilayah A tetapi sebagian pekerjanya berdomisili di wilayah B, wilayah A menganggap seluruh lapangan kerja tersebut adalah miliknya dan dihitung dalam total lapangan kerja wilayah yang tersedia. Wilayah B juga menganggap pekerjanya yang bekerja ke wilayah A adalah lapangan kerja basis buat wilayah B. jika hal ini terjadi maka akan timbul penghitungan ganda (*double counting*). Jadi, perlu di klarifikasi terlebih dahulu sebelum menetapkan ranking antar wilayah.

Hal ini terdapat banyak permasalahan yang telah dikemukakan, dimana dalam masing-masing analisis dngan membuat cara pemecahan yang berbeda satu dengan lainnya. Adapun alasan yang disampaikan dalam menentukan cara yang ditempuh pada umumnya yaitu dengan kesepakatan, atau (*arbitrary*), namun dalam hal ini sering dianggapnya kurang ilmiah, akan tetapi cara seperti ini sering dipakai atau digunakan dalam memilih kegiatan basis dengan kegiatan non basis.

### **Tahap Ketiga**

Membuat laporan dari hasil penelitian tentunya akan dikemas dengan sebaik mungkin agar penelitian ini sebagai referensi dan strategi dalam meningkatkan pertumbuhan, pemerataan, dan potensi yang menjadi unggulan atau potensi kearifan lokal ekonomi khususnya di Tangerang Selatan, serta memiliki dampak yang lebih luas lagi serta konektivitas berbagai jaringan guna dapat menumbuhkan beberapa usaha-usaha ekonomi yang terkait disekitarnya, karena disetiap usaha ekonomi yang sifatnya bersekala besar serta dengan influential maka akan menumbuhkan beberapa bentuk usaha ekonomi lainnya yang akan mendukungnya. Dalam Pengembangan perekonomian regional Tangerang Selatan perlu adanya sumbangsih dan masukan- masukan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat, akademisi yang tentunya hasil dari penelitian yang kami lakukan dapat memberikan sumbangsih dan

nantinya dapat diimplementasikan dalam membuat suatu kebijakan Pemerintah Tangerang Selatan, namun tetap memperhatikan juga koordinasi kebijakan ekonomi nasional, sehingga terjadi sinkronisasi antara kebijakan daerah dan pusat, karena Tangerang Selatan adalah salah satu wilayah penyangga perekonomian Ibu kota Negara Republik Indonesia.

### HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan memiliki PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ke 5 terbesar dari 8 wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Pada tahun 2015, Kota Tangerang Selatan memiliki pertumbuhan PDRB sebesar 13,4%. Diketahui bahwa PDRB Kota Tangerang Selatan yang menjadi penyumbang terbesar adalah pada sektor perdagangan yaitu Rp. 2,7 triliun pada tahun 2015. Kontribusi besarnya pada sektor perdagangan di

wilayah Kota Tangerang Selatan menunjukkan karakteristik/ciri-ciri wilayah Tangerang Selatan merupakan daerah perkotaan, yaitu terlihat nampaknya banyaknya pasar dan juga pusat-pusat pertokoan atau perbelanjaan. Dengan demikian menjadikan Kota Tangerang Selatan memiliki peranan serta fungsi lebih luas menjadi pusat perdagangan sebagai kota yang berkembang semakin maju.

Selain perdagangan, PDRB Kota Tangerang Selatan ditopang oleh beberapa sektor lainnya, seperti: sektor Jasa-jasa, Industri Pengolahan, Pengangkutan serta Komunikasi. Sementara pada sektor Perikanan, Peternakan, Pertambangan, Pertanian, Kehutanan dan Penggalian adalah sektor terkecil penyumbang pada PDRB Kota Tangerang Selatan.

Secara lebih terinci, Produk Domestik Regional Bruto Kota Tangerang Selatan dan Propinsi Banten seperti terlihat pada Tabel 1 dan 2 dibawah ini.

**Tabel 1.** Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2015 – 2019

	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,34	0,03	2,03	0,96	1,50
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	3,86	-2,02	1,37	0,92	0,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,12	10,71	5,97	7,72	7,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,66	6,54	7,42	4,85	4,97
F	Konstruksi	6,63	8,08	8,82	9,03	9,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran,	5,94	5,60	6,11	7,57	7,43

	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Perdagangan	8,01	9,37	9,73	9,16	8,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	7,01	7,59	7,83	7,49	7,76
J	Informasi dan Komunikasi	9,55	8,23	8,41	7,98	7,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,58	8,07	8,93	8,90	8,67
L	Real Estat	8,55	9,11	8,47	8,05	8,03
M, N	Jasa Perusahaan	9,88	9,57	9,32	8,66	8,37
O	Administrasi Pemerintahan	8,72	8,41	7,64	7,71	7,77
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	8,69	7,46	7,84	7,97	7,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,98	7,12	7,26	6,75	6,74
R, S, T, U	Jasa Lainnya	5,78	8,63	7,92	7,66	7,59
Produk Domestik Regional Bruto		7,25	6,74	7,30	7,37	7,35

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan

**Tabel 2.** Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Banten Atas Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2015 – 2019

	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,61	6,58	4,28	3,58	2,21
B	Pertambangan dan Pengalihan	3,66	3,43	-0,68	0,72	0,38
C	Industri Pengolahan	3,53	3,09	3,70	3,61	3,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,39	-4,14	0,50	7,20	-3,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,16	6,83	7,30	4,88	5,62
F	Konstruksi	7,96	6,31	8,28	7,76	8,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,92	3,85	6,15	7,25	7,58
H	Transportasi dan Perdagangan	6,57	7,65	8,57	7,37	0,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	6,41	7,58	8,28	7,45	7,95
J	Informasi dan Komunikasi	9,18	8,04	8,42	7,87	8,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,40	14,31	3,89	6,94	2,48
L	Real Estat	7,19	7,80	7,92	7,88	8,75
M, N	Jasa Perusahaan	7,78	7,44	7,91	6,62	8,57
O	Administrasi Pemerintahan	6,55	7,11	4,79	5,29	7,87

	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	6,69	6,64	7,42	7,43	7,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,18	7,42	8,15	6,85	8,55
R,S,T ,U	Jasa Lainnya	6,54	7,53	8,27	7,63	8,67
Produk Domestik Regional Bruto		5,45	5,28	5,75	5,82	5,53

Sumber: BPS Provinsi Banten

Dari tabel dapat diketahui yang menjadi faktor unggulan atau dari sektor basis dan non basis Kota Tangerang Selatan, dapat dihitung menggunakan rumus dan juga analisis LQ (*Location Quotions*). Model analisis ini dihitung dengan membandingkan seberapa besarnya peranan salah satu sektor pada suatu daerah (kabupaten atau kota) tentang besarnya peran sektor tersebut pada tingkat provinsi.

Analisis ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi berapa potensi internal (sektor basis) yang saat ini dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan dan sektor non basis. Apabila indeks LQ > 1, dapat dikatakan bahwa sektor tersebut menjadi sektor basis, dan LQ = 1, sektor tersebut dapat dikatakan baru mampu untuk mencukupi permintaan pada wilayahnya sendiri, sedangkan apabila LQ < 1, sektor tersebut masuk kedalam sektor non basis.

Berdasarkan dari perhitungan LQ, diketahui hasil rata-rata nilai LQ pada sektor basis dan non basis wilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2015-2019.

dimana pada hasil perhitungan LQ ke 4 (empat) sektor dibawah ini memiliki hasil LQ>, artinya terdapat 4 (empat) sektor basis (sektor potensial) di wilayah Kota Tangerang Selatan, yaitu terdiri dari sektor: Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi.

Sedangkan pada sektor yang memiliki hasil LQ < 1, merupakan sektor non basis yaitu sektor: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa lainnya.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, maka diketahui bahwa di Kota Tangerang



Selatan terdapat beberapa sektor basis (sektor potensial), yaitu pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi.

Ke 4 (empat) sektor basis tersebut menjadi sektor dominan untuk terus dapat dipertahankan dan dikembangkan di Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu diharapkan Kota Tangerang Selatan dapat memberikan kontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara regional maupun nasional.

## REFERENSI

- Tarigan Robinson (2010). *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara , Jakarta
- Jamalia, J. S. (2011). *Studi pengembangan wilayah kota tangerang Selatan melalui pendekatan sektor- sektor unggulan*. (Skripsi S1. Fakultas Sains dan Teknologi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Bogdja Muljarijadi. (2011). *Pembangunan Ekonomi Wilayah Pendekatan Analisis Tabel Input Output*, Penerbit Unpad Press, Bandung.
- Rusdadi, Ernan dkk. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta Crespent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Junaidi A. (2012). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia* Jurnal Kajian Ekonomi Volume 1 No. 1
- Adisasmito, Raharjo (2013) *Teori-teori Pembangunan Ekonomi; Pertumbuhan Ekonomi; Pertumbuhan Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dobrescu, E. M., & Dobre, E. M. (2014). Theories regarding the role of the growth poles in the economic integration. *Procedia Economics and Finance*, 8, 262-267
- BAPPEDA, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan 2016 – 2021*, BAPPEDA Tangerang Selatan.
- A RRT Hidayat, A.Y Asmara. (2017). *Creative Industri in Supporting Economy Growth in Indonesia, Perspective of Regional Innovation System, I O P Conf. Earth and Environment science, Vol 70, 2017*.
- BPS. (2020) *Produk Domestik Regional Bruto Kota Tangerang Selatan menurut Lapangan Usaha 2015 – 2019*, Badan Pusat Statistik, Tangerang Selatan.
- BPS. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten menurut Lapangan Usaha 2015 – 2019*, Badan Pusat Statistik, Banten.